



KEPALA DESA PUCUNG
KECAMATAN EROMOKO KABUPATEN WONOGIRI

PERATURAN DESA PUCUNG
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PUCUNG
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PUCUNG ,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Wonogiri

- dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6515);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Dan Belanja Negara Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 215);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5694);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja

- Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494);
 17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
 19. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 20. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
 21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 4);

22. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 17);
23. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Badan Usaha Milik Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 18);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri 137) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 148);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Peraturan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri 138);
26. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2019 Nomor 31 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 39 tahun 2020 tentang pengelolaan keuangan Desa (Berita daerah Kabupaten Wonogiri tahun 2020 nomor 39);
27. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa (Berita

- Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2019 Nomor 56);
28. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2020 Nomor 10);
 29. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 47 Tahun 2022 tentang Standarisasi Indeks Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2022 Nomor 47);
 30. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 64 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2022 Nomor 64);
 31. Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2022 tentang Penetapan Alokasi Dana Desa Bagi Desa di Wilayah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2022 Nomor 65);
 32. Peraturan Desa Pucung Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Pucung Tahun 2021 Nomor 1);
 33. Peraturan Desa Pucung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pucung Tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Pucung Tahun 2020 Nomor 5);
 34. Peraturan Desa Pucung Nomor 10 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Pucung Tahun 2023 (Lembaran Desa Pucung Tahun 2022 Nomor 10);

Memperhatikan : Keputusan Camat Eromoko Nomor : 97 Tahun 2022 tanggal, 30 Desember 2022 tentang Evaluasi Peraturan Desa Pucung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PUCUNG
Dan
KEPALA DESA PUCUNG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PUCUNG TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pucung Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	2.110.484.000
2. Belanja Desa	<u>Rp</u>	<u>2.116.437.386</u>
Surplus/Defisit	Rp	(5.953.386)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	5.953.386
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp</u>	<u>-</u>
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	5.953.386

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- APB Desa;
- Daftar Penyertaan Modal;
- Daftar Dana Cadangan;
- Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:

- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosiasl; dan
- e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi :

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan,

kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Pucung.

Ditetapkan di Pucung

Pada Tanggal 3 Januari 2023

Kepala Desa Pucung,



ASHARI

Diundangkan di Pucung

pada tanggal 3 Januari 2023

SEKRETARIS DESA PUCUNG,



SUTARTO

LEMBARAN DESA PUCUNG TAHUN 2023 NOMOR 2

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA PUCUNG
TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2	3	4	5
4.		PENDAPATAN	2,110,484,000	
4.1.		Pendapatan Asli Desa	25,800,000	
4.1.1.		Hasil Usaha Desa	-	
4.1.2.		Hasil Aset Desa	25,800,000	
4.1.3.		Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	-	
4.1.4.		Lain-Lain Pendapatan Asli Desa	-	
4.2.		Pendapatan Transfer	2,084,684,000	
4.2.1.		Dana Desa	1,139,505,000	
4.2.2.		Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	26,451,000	
4.2.3.		Alokasi Dana Desa	763,728,000	
4.2.4.		Bantuan Keuangan Provinsi	155,000,000	
4.2.5.		Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	-	
4.3.		Pendapatan Lain-lain	-	
4.3.1.		Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa	-	
4.3.2.		Penerimaan dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga	-	
4.3.3.		Penerimaan Bantuan dari Perusahaan yang Berlokasi di Desa	-	
4.3.4.		Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga	-	
4.3.5.		Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya	-	
4.3.6.		Bunga Bank	-	
4.3.90.		Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah	-	
		JUMLAH PENDAPATAN	2,110,484,000	
	5.	BELANJA	2,116,437,386	
1.		Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	1,029,976,186	
1.1.		Sub Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	974,123,659	ADD
1.1.01.		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	62,400,000	ADD
1.1.01.	5.1.	Belanja Pegawai.	62,400,000	ADD
1.1.02.		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	458,640,000	ADD
1.1.02.	5.1.	Belanja Pegawai.	458,640,000	ADD
1.1.03.		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	18,036,960	ADD
<u>1.1.03.</u>		<u>02. Jaminan Ketenagakerjaan Kades dan Perangkat Desa</u>	<u>18,036,960</u>	<u>ADD</u>
1.1.03.	5.1.	Belanja Pegawai.	18,036,960	ADD
1.1.04.		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	42,466,699	ADD,PBH
1.1.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa.	42,466,699	ADD, PBH
1.1.05.		Penyediaan Tunjangan BPD	55,900,000	ADD, PBH
1.1.05.	5.1.	Belanja Pegawai.	55,900,000	ADD, PBH
1.1.06.		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	1,430,000	ADD, PBH
1.1.06.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa.	1,430,000	ADD,PBH
1.1.07.		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	240,000,000	ADD, DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2	3	4	5
1.1.07.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa.	240,000,000	ADD, DDS
1.1.08.		Operasional Pemerintah Desa Yang Berasal Dari Dana Desa	34,000,000	DDS
<u>1.1.08.</u>		<u>01. Biaya Koordinasi Pemerintah Desa</u>	<u>16,000,000</u>	<u>DDS</u>
1.1.08.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa.	16,000,000	DDS
<u>1.1.08.</u>		<u>02. Dukungan Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Kerawanan Sosial</u>	<u>14,000,000</u>	
1.1.08.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa.	8,000,000	
1.1.08.	5.4.	Belanja Tidak Terduga.	6,000,000	DDS
<u>1.1.08.</u>		<u>03. Dukungan Kegiatan Seremonial dan Kegiatan Khusus lainnya</u>	<u>4,000,000</u>	<u>DDS</u>
1.1.08.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa.	4,000,000	DDS
1.1.90.		Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	61,250,000	ADD, PAD
<u>1.1.90.</u>		<u>01. TUNJANGAN EX-BENGGOK</u>	<u>25,800,000</u>	<u>PAD</u>
1.1.90.	5.1.	Belanja Pegawai.	25,800,000	PAD
<u>1.1.90.</u>		<u>02. TUNJANGAN HARI RAYA (THR)</u>	<u>35,450,000</u>	<u>ADD</u>
1.1.90.	5.1.	Belanja Pegawai.	35,450,000	ADD
1.2.		Sub Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	10,750,000	
1.2.01.		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	10,750,000	
1.2.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa.	6,750,000	DDS
1.2.01.	5.3.	Belanja Modal.	4,000,000	ADD
1.3.		Sub Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	10,053,849	
1.3.01.		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	5,038,849	ADD, SLP PAD
1.3.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa.	5,038,849	ADD, SLP PAD
1.3.02.		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa (**)	3,450,000	DDS
<u>1.3.02.</u>		<u>01. Pemutakhiran Data Profil Desa</u>	<u>700,000</u>	<u>DDS</u>
1.3.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa.	700,000	DDS
<u>1.3.02.</u>		<u>08. Pelaksanaan Pemutakhiran Data SDGS Desa</u>	<u>2,750,000</u>	<u>DDS</u>
1.3.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa.	2,750,000	DDS
1.3.05.		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	1,565,000	DDS
<u>1.3.05.</u>		<u>01. Pelaksanaan Verval DTKS</u>	<u>1,565,000</u>	<u>DDS</u>
1.3.05.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa.	1,565,000	DDS
1.4.		Sub Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	21,048,678	
1.4.01.		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	2,668,678	
<u>1.4.01.</u>		<u>01. MusrenbangDesa Dalam Rangka RKPD</u>	<u>2,668,678</u>	<u>SLP ADD</u>
1.4.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa.	2,668,678	SLP ADD
1.4.02.		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	2,140,000	
<u>1.4.02.</u>		<u>04. Mudes/Rembuk Stunting Desa</u>	<u>2,140,000</u>	<u>DDS</u>
1.4.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa.	2,140,000	DDS
1.4.03.		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDDesa dll)	3,900,000	DDS
<u>1.4.03.</u>		<u>01. Penyusunan RKPDDesa</u>	<u>3,900,000</u>	<u>DDS</u>
1.4.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa.	3,900,000	DDS
1.4.04.		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	2,100,000	
<u>1.4.04.</u>		<u>01. Penyusunan APBDDesa</u>	<u>1,050,000</u>	
1.4.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa.	1,050,000	DDS
<u>1.4.04.</u>		<u>02. Penyusunan APBDDesa Perubahan</u>	<u>1,050,000</u>	<u>DDS</u>
1.4.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa.	1,050,000	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2	3	4	5
1.4.05.		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	2,250,000	PBH
1.4.05.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa.	2,250,000	PBH
1.4.07.		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	900,000	DDS
<u>1.4.07.</u>		<u>01. Penyusunan LPPD</u>	<u>900,000</u>	<u>DDS</u>
1.4.07.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa.	900,000	DDS
1.4.08.		Pengembangan Sistem Informasi Desa	7,090,000	ADD, DDS
1.4.08.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa.	7,090,000	ADD, DDS
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	14,000,000	
1.5.01.		Sertifikasi Tanah Kas Desa	14,000,000	ADD
1.5.01.	5.3.	Belanja Modal.	14,000,000	ADD
2.		Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	729,255,200	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	36,000,000	
2.1.01.		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	36,000,000	DDS
<u>2.1.01.</u>		<u>01. Dukungan Operasional PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)</u>	<u>36,000,000</u>	<u>DDS</u>
2.1.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa.	36,000,000	DDS
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	67,705,000	
2.2.01.		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	8,100,000	DDS
2.2.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa.	8,100,000	DDS
2.2.02.		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, KIs Bumil, Lamsia, Insentif)	56,005,000	DDS
<u>2.2.02.</u>		<u>01. Penyelenggaraan Posyandu Balita</u>	<u>33,900,000</u>	<u>DDS</u>
2.2.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa.	33,900,000	DDS
<u>2.2.02.</u>		<u>02. Penyelenggaraan Posyandu Ibu Hamil</u>	<u>525,000</u>	
2.2.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa.	525,000	DDS
<u>2.2.02.</u>		<u>03. Penyelenggaraan Posyandu Lansia</u>	<u>18,000,000</u>	
2.2.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa.	18,000,000	DDS
<u>2.2.02.</u>		<u>04. Pembentukan Posyandu Remaja dan Penyelenggaraan Posyandu Remaja</u>	<u>2,200,000</u>	<u>DDS</u>
2.2.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa.	2,200,000	DDS
<u>2.2.02.</u>		<u>05. Dukungan Operasional Kader Pembangunan Manusia (KPM)</u>	<u>1,380,000</u>	<u>DDS</u>
2.2.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa.	1,380,000	DDS
2.2.95.		Penyediaan Operasional Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) dan Tim Pendamping Keluarga (TPK)	2,400,000	DDS
<u>2.2.95.</u>		<u>01. Penyediaan Operasional Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS)</u>	<u>1,000,000</u>	<u>DDS</u>
2.2.95.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa.	1,000,000	DDS
<u>2.2.95.</u>		<u>2. Dukungan Operasional Tim Pendamping Keluarga</u>	<u>1,400,000</u>	<u>DDS</u>
2.2.95.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa.	1,400,000	DDS
2.2.96.		Dukungan Operasional Rumah Desa Sehat (RDS)	1,200,000	DDS
2.2.96.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa.	1,200,000	DDS
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	411,800,000	
2.3.03.		Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	82,000,000	DDS
2.3.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa.	82,000,000	DDS
2.3.14.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	6,000,000	DDS
<u>2.3.14.</u>		<u>01. Pembangunan/Rehab Gorong-Gorong dusun Pucung Kidul</u>	<u>6,000,000</u>	<u>DDS</u>
2.3.14.	5.3.	Belanja Modal.	6,000,000	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2	3	4	5
2.3.91.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Tembok Penahan Tanah/Bronjong/ Talud/ Tanggul Desa**	323,800,000	DDS, PBP
<u>2.3.91.</u>		<u>01. Pembangunan Talud Jalan Dusun Soko</u>	<u>50,000,000</u>	<u>PBP</u>
2.3.91.	5.3.	Belanja Modal.	50,000,000	PBP
<u>2.3.91.</u>		<u>02. Pembangunan Talud Jalan Turi-Mijil</u>	<u>61,000,000</u>	
2.3.91.	5.3.	Belanja Modal.	61,000,000	DDS
<u>2.3.91.</u>		<u>03. Pembangunan Talud Jalan Dunaqudel-Pucungkidul</u>	<u>50,000,000</u>	
2.3.91.	5.3.	Belanja Modal.	50,000,000	DDS
<u>2.3.91.</u>		<u>04. Pembangunan Talud Jalan Dusun Jalakan RT. 002/009</u>	<u>60,800,000</u>	
2.3.91.	5.3.	Belanja Modal.	60,800,000	DDS
<u>2.3.91.</u>		<u>05. Pembangunan Talud Jalan Pucung Kidul RT. 002/004</u>	<u>62,000,000</u>	
2.3.91.	5.3.	Belanja Modal.	62,000,000	DDS
<u>2.3.91.</u>		<u>06. Pembangunan Talud Jalan Dusun Brenkut RT. 002/011</u>	<u>40,000,000</u>	
2.3.91.	5.3.	Belanja Modal.	40,000,000	DDS
2.4.01.		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	160,000,000	DDS, PBP
2.4.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa.	160,000,000	DDS, PBP
2.4.04.		Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Pipanisasi dll)	10,000,000	PBH
2.4.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa.	10,000,000	PBH
2.4.13.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman **)	15,000,000	DDS
<u>2.4.13.</u>		<u>01. Pembangunan Drainase Dusun Turi RT. 001/008</u>	<u>15,000,000</u>	<u>DDS</u>
2.4.13.	5.3.	Belanja Modal.	15,000,000	DDS
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	4,750,200	
2.6.02.		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	4,750,200	SLP DDS
<u>2.6.02.</u>		<u>01. Pengadaan Informasi Publik</u>	<u>1,750,200</u>	<u>SLP DDS</u>
2.6.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa.	1,750,200	SLP DDS
<u>2.6.02.</u>		<u>02. Pengadaan Rangka Baliho Informasi Publik</u>	<u>3,000,000</u>	
2.6.02.	5.3.	Belanja Modal.	3,000,000	DDS
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	24,000,000	
2.8.03.		Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	24,000,000	ADD
<u>2.8.03.</u>		<u>01. Dukungan Event dan Promosi Wisata</u>	<u>24,000,000</u>	<u>ADD</u>
2.8.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa.	24,000,000	ADD
3.		Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	54,035,000	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	17,500,000	
3.1.04.		Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	10,000,000	ADD
3.1.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa.	10,000,000	ADD
3.1.90.		Dukungan Pembinaan Keamanan, Ketertiban, dan Ketentraman Wilayah dan Masyarakat Desa (Seragam dan Op Linmas, BABINSA, BABINKAMTIBMAS)	7,500,000	DDS
3.1.90.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa.	7,500,000	DDS
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	3,150,000	
3.2.03.		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	3,150,000	DDS
<u>3.2.03.</u>		<u>01. Peringatan HUT RI</u>	<u>3,150,000</u>	<u>DDS</u>
3.2.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa.	3,150,000	DDS
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	15,450,000	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2	3	4	5
3.3.01.		Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota	2,000,000	DDS
3.3.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa.	2,000,000	DDS
3.3.03.		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	4,150,000	DDS
3.3.03.		<i>01. Turnamen/Kejuaraan Bola Voli antar Dusun</i>	<i>4,150,000</i>	<i>DDS</i>
3.3.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa.	4,150,000	DDS
3.3.04.		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	5,000,000	ADD
3.3.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa.	5,000,000	ADD
3.3.05.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	2,500,000	
3.3.05.		<i>01. Pengadaan Sarana Prasarana.....</i>	<i>2,500,000</i>	
3.3.05.	5.3.	Belanja Modal.	2,500,000	DDS
3.3.06.		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	1,800,000	DDS
3.3.06.		<i>01. Pembinaan Karangtaruna</i>	<i>1,800,000</i>	<i>DDS</i>
3.3.06.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa.	1,800,000	DDS
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	17,935,000	
3.4.02.		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	2,935,000	DDS
3.4.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa.	2,935,000	DDS
3.4.03.		Pembinaan PKK	10,000,000	DDS
3.4.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa.	10,000,000	DDS
3.4.90.		Dukungan Peningkatan Peran dan Fungsi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa	5,000,000	PBP
3.4.90.		<i>01. Dukungan Operasional KPMD</i>	<i>5,000,000</i>	<i>PBP</i>
3.4.90.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa.	5,000,000	PBP
4.		Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	165,271,000	
4.1.		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	3,000,000	
4.1.05.		Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)	3,000,000	DDS
4.1.05.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa.	3,000,000	DDS
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	140,500,000	DDS
4.2.01.		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)	107,500,000	DDS
4.2.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa.	107,500,000	DDS
4.2.05.		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	3,000,000	
4.2.05.		<i>01. Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik</i>	<i>3,000,000</i>	<i>DDS</i>
4.2.05.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa.	3,000,000	DDS
4.2.06.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	30,000,000	
4.2.06.		<i>01. Pembangunan Irigasi Gundi RT. 001/013</i>	<i>30,000,000</i>	<i>DDS</i>
4.2.06.	5.3.	Belanja Modal.	30,000,000	DDS
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	11,000,000	DDS
4.3.01.		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	2,000,000	DDS
4.3.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa.	2,000,000	DDS
4.3.02.		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	9,000,000	
4.3.02.		<i>01. Klinik Sistem Keuangan Desa (siskeudes)</i>	<i>1,000,000</i>	<i>DDS</i>
4.3.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa.	1,000,000	DDS
4.3.02.		<i>02. BimTek Perangkat Desa</i>	<i>8,000,000</i>	<i>DDS</i>
4.3.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa.	8,000,000	DDS
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	9,371,000	
4.5.01.		Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	2,500,000	
4.5.01.		<i>01. Pelatihan/Penyuluhan UMKM</i>	<i>2,500,000</i>	<i>DDS</i>
4.5.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa.	2,500,000	DDS
4.5.02.		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	6,871,000	PBH
4.5.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa.	6,871,000	PBH

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2	3	4	5
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	1,400,000	
4.6.02.		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	1,400,000	DDS
4.6.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa.	1,400,000	DDS
5.		Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	137,900,000	DDS
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	10,000,000	DDS
5.1.01.		Kegiatan Penanggulangan Bencana	10,000,000	DDS
5.1.01.		01. Penanggulangan Bencana Non-Alam	5,000,000	DDS
5.1.01.	5.4.	Belanja Tidak Terduga.	5,000,000	DDS
5.1.01.		02. Penanggulangan Bencana Alam	5,000,000	DDS
5.1.01.	5.4.	Belanja Tidak Terduga.	5,000,000	DDS
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	5,500,000	DDS
5.2.01.		Penanganan Keadaan Darurat	5,500,000	DDS
5.2.01.	5.4.	Belanja Tidak Terduga.	5,500,000	DDS
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	122,400,000	DDS
5.3.01.		Penanganan Keadaan Mendesak	122,400,000	DDS
5.3.01.		01. Bantuan Langsung Dana Desa	122,400,000	DDS
5.3.01.	5.4.	Belanja Tidak Terduga.	122,400,000	DDS
		JUMLAH BELANJA	2,116,437,386	
		SURPLUS / (DEVISIT)	(5,953,386)	
6.		PEMBIAYAAN.	5,953,386	
6.1.		Penerimaan Pembiayaan.	5,953,386	
6.1.01.		Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenan (SILPA)	5,953,386	
6.1.01.01.		1. SILPA PAD	478,849	SLP PAD
6.1.01.02.		2. SILPA ADD	2,668,678	SLP ADD
6.1.01.03.		3. SILPA DD	1,750,200	SLP DDS
6.1.01.04.		4. SILPA BHP	1,055,659	SLP PBH
6.1.01.05.		5. SILPA Bankeu Provinsi (PBP)	-	SLP PBP
6.1.01.06.		6. SILPA Bankeu Kabupaten (PBK)	-	SLP PBK
6.1.01.07.		7. SILPA SWADAYA (SWD)	-	SLP SWD
6.1.01.08.		8. SILPA Dan Lain-Lain (DLL)	-	SLP DLL
		Pencairan Dana Cadangan	-	
6.1.02.		Pencairan Dana Cadangan	-	
		Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan	-	
6.1.03.		Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan	-	
6.1.		JUMLAH PENERIMAN PEMBIAYAAN	5,953,386	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan.	-	
6.2.01.		Pembentukan Dana Cadangan	-	
6.2.01.		Pembentukan Dana Cadangan	-	
6.2.02.		Penyertaan Modal Desa	-	
6.2.02.01.		- Penyertaan Modal Desa (BumDesa)	-	
6.2.02.02.		- Penyertaan Modal Desa (BumDesa Bersama)	-	
6.2.		JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	
		PEMBIAYAAN NETTO	5,953,386	
		Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenan (SILPA)	-	

Pucung, 3 Januari 2023

KEPALA DESA PUCUNG



ASHARI